

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistematis, bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peserta seluruh elemen warga bangsa Indonesia. Pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa pada zamannya.

Dewasa ini, kinerja pembangunan suatu bangsa dapat diukur dari signifikansi perubahan indeks kualitas manusia sebagai subyek pembangunan. Indikator global untuk mengukur tingkat kualitas manusia dari suatu bangsa meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan perkapita dari setiap manusia.

Namun untuk negara berkembang yang karakteristik budayanya masih didominasi oleh kultur yaitu etika, moral, maka kualitas suatu bangsa juga perlu diukur dari motivasi diri seorang aparatur negara sampai kepada yang paling bawah yaitu aparatur pemerintahan desa. Yang harus dilihat adalah bagaimana motivasi atau jiwa kerja aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya.

Di samping itu Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Dampak positif dengan

pemberian otonomi daerah memberikan kesempatan dan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah. Namun demikian dampak negatif yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah dalam menyongsong penyerahan otonomi daerah tersebut yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia aparatur yang berkeahlian, sarana dan prasarana yang belum menunjang dan masih kurangnya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintah daerah berdasarkan karakteristik daerah, karena apa bila beban kerja semakin besar maka kualitas aparatur tentunya perlu disesuaikan dengan perkembangan dimaksud.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut sebanyak mungkin pendayagunaan potensi-potensi di daerah. Potensi daerah itu adalah sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya ekonomi atau anggaran yang sasaran utama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah. Sumber daya manusia (SDM) sangat besar pengaruhnya dalam mendorong pengabdian, kemauan berjuang dan berbuat, serta keikhlasan dalam pembangunan di daerah. Apabila dikatakan sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki suatu organisasi, salah satu implikasinya ialah bagaimana pelaksanaan otonomi tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat sambutan positif dan penuh harapan dari seluruh masyarakat di daerah dalam upaya meningkatkan

pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat dalam berdemokrasi dan melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini berorientasi untuk membangun manusia yang berkualitas, berjiwa mandiri yang secara bertahap untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) sangat diharapkan terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah sampai ke tingkat desa diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah yang langsung berhubungan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya atau lazim disebut otonomi desa. (Haw. Widjaja,2004:20).

Pembangunan desa akan berjalan dengan baik apabila kinerja pemerintahan desa bekerja secara maksimal. Kinerja seseorang akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aparatur pemerintah desa sangat dituntut agar dalam melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan umum kepada masyarakat misalnya dalam pengurusan Surat keterangan, surat izin dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa kinerja membutuhkan suatu keterampilan, upaya, dan sifat-sifat keadaan internal dari aparatur pemerintah desa. Keterampilan dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan dapat berupa pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis, sehingga apa yang menjadi tujuan dari suatu desa khususnya

dalam peningkatan kinerja aparatur akan tercapai dengan baik dan masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato. Desa yang memiliki jumlah penduduk 654 jiwa dengan 165 jumlah kepala keluarga dan memiliki potensi dibidang pertanian/peternakan yang juga mempunyai program inti yaitu peningkatan mutu aparat, pemerataan pembangunan, pemberantasan kemiskinan dan buta aksara dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di desa belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan masih mengalami beberapa permasalahan yang ada antara lain: tingkat pendidikan sangat minim, kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses teknologi (aparatur pemerintah desa masih banyak yang belum bisa mengakses komputer dengan baik), pembuatan surat izin sangat lambat dan usia aparatur pemerintah desa yang rata-rata 40 tahun ke atas. Beberapa kendala tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kinerja yang ada di Desa Tunas Harapan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “ **Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**” (*Studi Penelitian Di Kantor Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato*).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato ?
2. Kendala apa yang di hadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.
3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Manfaat praktis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
 - b. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi semua elemen yang terkait dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
- Manfaat Teoritis dan Akademik
 - a. Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam pengembangan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.